



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 DASAR HUKUM PEMBENTUKAN RSUD DOKTER RUBINI MEMPAWAH KABUPATEN MEMPAWAH**

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah adalah Lembaga Teknis Daerah yang setara dengan bentuk Kantor dan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dasar Hukum pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak No. 07 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah, kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak No. 01 Tahun 2010 Tanggal 24 April 2010 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Kelas C sesuai dengan surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 533/MENKES/SK/VI/1996 tanggal 5 Juni 1996 dan telah dikukuhkan Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah dari kelas D menjadi kelas C sesuai dengan SK Bupati Pontianak No 288 tahun 2002 Tanggal 20 September 2002.

RSUD dr. Rubini merupakan entitas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) penuh sesuai dengan Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 tanggal 24 November 2016, RSUD dr. Rubini merupakan rumah sakit umum yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan status penuh.

Perubahan status dari SKPD biasa menjadi BLUD, mendorong RSUD dr. Rubini dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih cepat dan berkualitas. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah terletak di Jl. Raden Kusno No. 1 Mempawah. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah ini berdiri di atas lahan seluas 22.500 m<sup>2</sup>.

## 1.2. VISI DAN MISI PERANGKAT DAERAH

Adapun Visi Kabupaten Mempawah adalah : “Menjadikan Kabupaten Mempawah Yang Cerdas, Mandiri dan Terdepan”

**Visi** : Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Instansi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah akan diarahkan dan apa yang akan dicapai.

Adapun Visi RSUD Dokter. Rubini Mempawah adalah :

### **Terwujudnya Pelayanan Rumah Sakit Yang Berkualitas**

**Misi** : Misi adalah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

**Misi RSUD Dokter Rubini Mempawah adalah :**

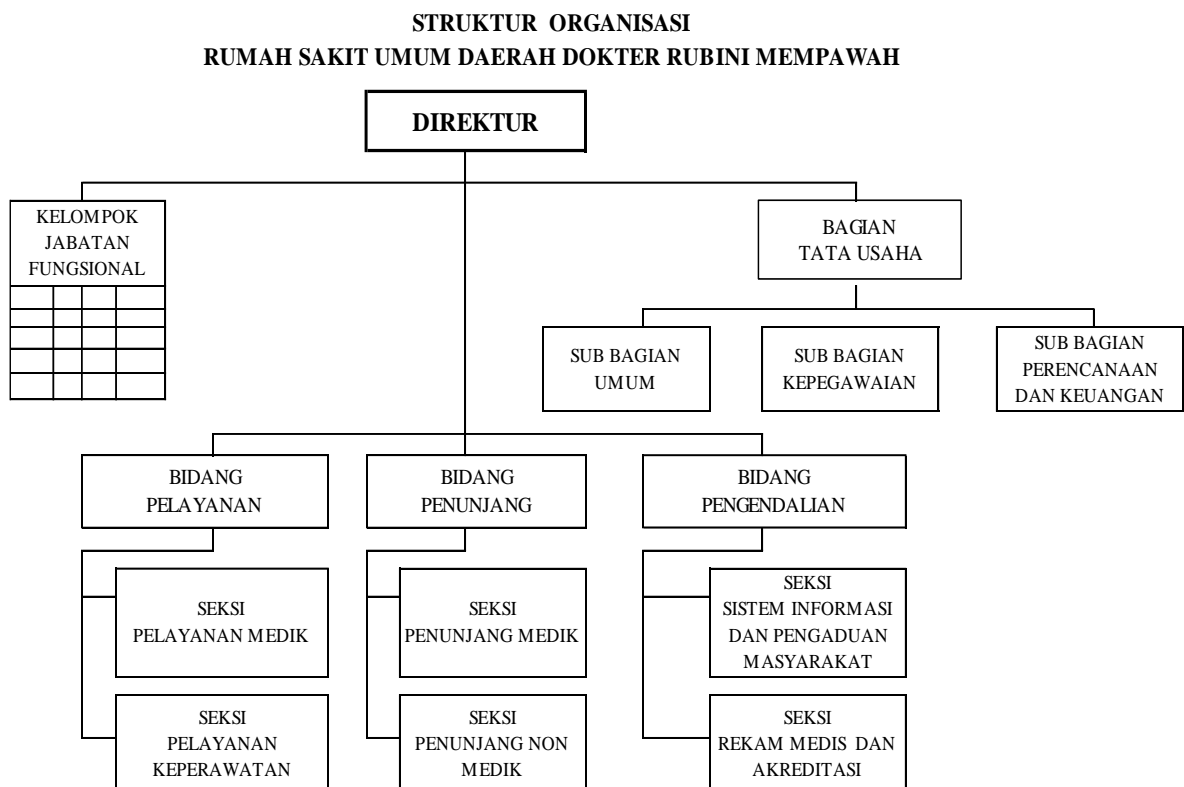
1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Profesionalisme Sumber Daya Manusia Rumah Sakit
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

### 1.3 DATA UMUM

**Data Umum Perangkat Daerah RSUD DOKTER RUBINI Mempawah Kabupaten Mempawah secara umum yang meliputi :**

#### 1.3.1 Struktur Organisasi RSUD Dokter Rubini Kabupaten Mempawah

Struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah berdasarkan PERDA No.1 Tahun 2010, adalah sebagai berikut ;



Berdasarkan Peraturan Bupati Pontianak Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Tugas Dan Fungsi Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah Tanggal 10 Oktober 2010, bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan Kesehatan.

### 1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah,

#### 1. Tugas

Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan Kesehatan. Upaya kesehatan ini dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan serta melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar Pelayanan Rumah Sakit.

**Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah di pimpin oleh seorang Kepala Rumah Sakit yang disebut Direktur, yang membawahi yaitu :**

- a. 1 (satu) Kepala Bagian Tata Usaha dengan 3 (tiga) sub bagian yaitu:
  - 1(satu) Kepala Sub Bagian Kepegawaian,
  - 1 (satu) Kepala Sub Bagian Umum dan
  - 1 (satu) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. 1 (satu) Kepala Bidang Pelayanan dengan 2 (dua) Seksi yaitu :
  - 1(satu) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan
  - 1 (satu) Kepala Seksi Pelayanan Medik;
- c. 1 (satu) Kepala Bidang Penunjang dengan 2 (dua) Seksi yaitu :
  - 1(satu) Kepala Seksi Penunjang Medik dan
  - 1(satu) Kepala Seksi Penunjang Non Medik
- d. 1 (satu) Kepala Bidang Pengendalian dengan 2 (dua) Seksi yaitu :
  - 1(satu) Kepala Seksi Sistem Informasi dan Pengaduan Masyarakat dan
  - 1(satu) Kepala Seksi Rekam Medis dan Akreditasi
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2. Fungsi

Dalam melaksanakan kegiatan, masing-masing mempunyai tugas :

- a. **Direktur** mempunyai tugas memimpin Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah, baik segi teknis operasional maupun administrasi sesuai dengan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. **Bagian Tata Usaha**, sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan dan rumah tangga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan tugas – tugas bidang ;
2. Pengelolaan administrasi keuangan ;
3. Pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi, dan tatalaksana ;
4. Pengelolaan urusan umum, kearsipan dan kehumasan serta keprotokolan ;
5. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah ;
6. Pengkoordinasian penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan program kerja serta penganggaran Rumah Sakit Umum Daerah;
7. Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja Rumah sakit Umum Daerah;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh direktur.

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang **Kepala Bagian Tata Usaha** yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.



c. **Bidang Pelayanan**, sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah dibidang pelayanan kesehatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program kerja di bidang pelayanan kesehatan ;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan ;
3. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitas dan pembinaan dibidang pelayanan kesehatan ;
4. Pelaksanaan penyusunan prosedur pelayanan kesehatan ;
5. Pelaksanaan kegiatan pelayanan umum kesehatan ;
6. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan dibidang pelayanan ;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

**Bidang Pelayanan** dipimpin oleh seorang **Kepala Bidang Pelayanan** yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

d. **Bidang Penunjang**, sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah di bidang penunjang kesehatan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Penunjang mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja dibidang penunjang kesehatan ;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penunjang kesehatan;
3. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitas dan pembinaan dibidang penunjang kesehatan ;
4. Pelaksanaan pengelolaan penunjang medik dan non medik ;
5. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang penunjang kesehatan ;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Direktur ;

**Bidang Penunjang** dipimpin oleh seorang **Kepala bidang Penunjang** yang berada dibawah dan bertanggung jawab Direktur.



- e. **Bidang Pengendalian**, sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah di bidang pengendalian. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan program kerja di bidang pengendalian ;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian ;
  3. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang pengendalian;
  4. Pelaksanaan pengendalian kesehatan ;
  5. Pelaksanaan penyusunan sistem informasi kesehatan ;
  6. Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat ;
  7. Pelaksanaan kegiatan rekam medis ;
  8. Pelaksanaan akreditasi ;
  9. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan ;
  10. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pengendalian ;
  11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

**Bidang Pengendalian** dipimpin oleh seorang **Kepala bidang Pengendalian** yang berada dibawah dan bertanggung jawab Direktur.

### 1.3.3. Jumlah Pegawai RSUD Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah.

Dalam pelaksanaan tugasnya, RSUD Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah Tahun 2022 didukung oleh 372 orang PNS dan Non PNS 147 orang yang tercatat tersebut di deskripsikan seperti Tabel dibawah ini :

Tabel 1.3.3

**JUMLAH KETENAGAAN BERDASARKAN KEPANGKATAN / GOLONGAN PNS  
RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH PER DESEMBER 2022**

NO	JENJANG KEPANGKATAN	JENJANG GOLONGAN	JENIS KELAMIN		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PEMBINA UTAMA	IV.E	0	0	0
2	PEMBINA UTAMA MADYA	IV.D	0	0	0
3	PEMBINA UTAMA MUDA	IV.C	5	5	10
4	PEMBINA Tk. I	IV.B	3	8	11
5	PEMBINA	IV.A	8	13	21
<b>GOLONGAN IV</b>			<b>16</b>	<b>26</b>	<b>42</b>
6	PENATA Tk. I	III.D	14	46	60
7	PENATA	III.C	17	46	63
8	PENATA MUDA Tk. I	III.B	30	63	93
9	PENATA MUDA	III.A	11	17	28
<b>GOLONGAN IV</b>			<b>72</b>	<b>172</b>	<b>244</b>
10	PENGATUR Tk. I	II.D	14	9	23
11	PENGATUR	II.C	17	41	58
12	PENGATUR MUDA Tk. I	II.B	2	1	3
13	PENGATUR MUDA	II.A	2	0	2
<b>GOLONGAN IV</b>			<b>35</b>	<b>51</b>	<b>86</b>
14	JURU Tk. I	I.D	0	0	0
15	JURU	I.C	0	0	0
16	JURU MUDA Tk. I	I.B	0	0	0
17	JURU MUDA	I.A	0	0	0
<b>GOLONGAN IV</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH</b>			<b>123</b>	<b>249</b>	<b>372</b>





Tabel 1.3.3  
REKAPITULASI KETENAGAAN RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH  
BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN  
PER DESEMBER 2022

NO	JENJANG PENDIDIKAN	STATUS KETENAGAAN			KETERANGAN
		PNS	NON PNS	JUMLAH	
1	S2/PROFESI DOKTER SPESIALIS	13	10	23	
1	SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	1		
2	SPESIALIS BEDAH	3	1		
3	SPESIALIS ANAK	1	1		
4	SPESIALIS KANDUNGAN	1	1		
5	SPESIALIS ANESTESI	1	0		
6	SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	1	0		
7	SPESIALIS SARAF	1	1		
8	SPESIALIS PARU	1	0		
9	SPESIALIS KESEHATAN JIWA	1	0		
10	SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN	1	0		
11	SPESIALIS KESEHATAN FISIK DAN REHABILITASI	1	0		
12	SPESIALIS KESEHATAN GIGI ANAK	1	0		
13	SPESIALIS THT DAN KL	0	1		
14	SPESIALIS RADIOLOGI	0	1		
15	SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI	0	1		
16	SPESIALIS MATA	0	1		
17	SPESIALIS JANTUNG	0	1		
2	S2 KESEHATAN	6	0	6	
3	S2 ADMINISTRASI PUBLIK	3	0	3	
4	S2 GIZI	2	0	2	
5	S2 KEBIDANAN	1	0	1	
6	S1 FARMASI/APOTEKER	11	3	14	
7	S1 KEDOKTERAN UMUM	16	2	18	
8	S1 KEDOKTERAN GIGI	1	0	1	
9	S1 KEPERAWATAN/NERS	58	17	75	
10	S1 KEPERAWATAN (NON NERS)	1	0	1	
11	S1 GIZI	0	0	0	
12	S1 KESEHATAN MASYARAKAT	3	0	3	
13	S1 ILMU POLITIK DAN SOSIAL	1	0	1	
14	S1 EKONOMI	5	1	6	
15	S1 HUKUM	0	1	1	
16	S1 TEKNIK	1	0	1	
17	S1 TEKNIK INFORMATIKA	0	1	1	
18	S1 ADMINISTRASI PUBLIK	4	0	4	
19	S1 KEHUTANAN	0	1	1	
20	DIV KEPERAWATAN	2	0	2	
21	DIV KEPERAWATAN/NERS	18	0	18	
22	DIV KEBIDANAN	5	1	6	
23	DIV KEBIDANAN/PROFESI	3	0	3	
24	DIV RADIOLOGI	3	0	3	
25	DIV FISIOTERAPI	2	0	2	
26	DIV KESEHATAN LINGKUNGAN	2	0	2	
27	DIV ANALIS KESEHATAN	3	1	4	
28	DIV ELEKTRO MEDIS	1	0	1	
29	DIV ADMINISTRASI NEGARA	0	1	1	
30	DIII KEPERAWATAN	75	35	110	
31	DIII KEBIDANAN	20	11	31	
32	DIII KESEHATAN GIGI	5	2	7	
33	DIII ANESTESI	1	0	1	
34	DIII FARMASI	18	11	29	
35	DIII ANALIS KESEHATAN	15	5	20	
36	DIII KESEHATAN LINGKUNGAN	3	1	4	
37	DIII REKAM MEDIS	11	6	17	
38	DIII FISIOTERAPI	2	2	4	
39	DIII GIZI	10	1	11	
40	DIII RADIOLOGI	6	1	7	
41	DIII ELEKTROMEDIK	1	1	2	
42	DIII REFRAKSI OPTISIEN	1	0	1	
43	DIII TEKNIK ELEKTRO	1	0	1	
44	DIII KEUANGAN	1	0	1	
45	DIII TEKNIK KOMPUTER	0	0	0	
46	DIII TEKNIK INFORMATIKA	0	1	1	
47	DIII AKUNTANSI	0	3	3	
48	SPK	2	0	2	
49	SLTA SEDERAJAT	32	28	60	
50	SLTP SEDERAJAT	0	0	0	
51	SD SEDERAJAT	2	0	2	
<b>JUMLAH</b>		<b>372</b>	<b>147</b>	<b>519</b>	



Tabel 1.3.3  
REKAPITULASI KETENAGAAN RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH  
BERDASARKAN PROFESI / JENIS PEKERJAAN  
PER DESEMBER 2022

NO	JENJANG PENDIDIKAN	STATUS KETENAGAAN			KETERANGAN
		PNS	NON PNS	JUMLAH	
1	DOKTER SPESIALIS	14	10	24	
2	DOKTER UMUM	16	2	18	
3	DOKTER GIGI	2	0	2	
4	PERAWAT	147	51	198	
5	PERAWAT GIGI	5	2	7	
6	PERAWAT ANESTESI	5	0	5	
7	BIDAN	29	12	41	
8	APOTEKER	9	3	12	
9	ASISTEN APOTEKER	19	11	30	
10	ANALIS KESEHATAN	18	6	24	
11	SANITARIAN	5	1	6	
12	NUTRISIONIS	10	1	11	
13	FISIOTERAPIS	4	2	6	
14	PEREKAM MEDIS	11	6	17	
15	ELEKTROMEDIS	2	1	3	
16	RADIOGRAFER	9	1	10	
17	REFRAKSI OPTISIEN	0	0	0	
18	PENYULUH KESEHATAN	1	0	1	
19	MANAJEMEN	13	0	13	
20	FUNGSIONAL PELAKSANA	53	38	91	
JUMLAH		372	147	519	

#### 1.3.4 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan (opsional)

Dalam rangka menunjang pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, sangat dibutuhkan adanya dana / anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah disebutkan bahwa salah satu sumber dana yang bisa digunakan BLUD adalah Pendapatan yang diterima dari Jasa Layanan, Hasil Kerjasama dengan pihak lain, Hibah, APBD, APBN dan Pendapatan lain-lain yang sah.

Adapun Target dan Realisasi Pendapatan pada tahun 2022 RSUD Dokter Rubini Mempawah (per 31 Desember 2021) Target sebesar **Rp. 30.938.794.000,00** dan Realisasi sebesar **Rp.56.833.495.886,77** atau **183,70%** dapat dilihat pada Target dan Realisasi Pendapatan TA. 2022 sebagai berikut :

Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022				
RSUD Dokter Rubini Mempawah				
No	Uraian	Jumlah Target Anggaran 2022 (Rupiah)	Jumlah Realisasi Anggaran 2022 (Rupiah)	%
<b>1</b>	<b>2</b>			
1	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30.938.794.000,00	56.833.495.886,77	183,70
	- Pendapatan BLUD	30.938.794.000,00	56.833.495.886,77	183,70
<b>Total</b>		<b>30.938.794.000,00</b>	<b>56.833.495.886,77</b>	<b>183,70</b>

### 1.3.5 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Sumber dana yang dipergunakan untuk mendukung tugas-tugas RSUD Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Mempawah, Pendapatan BLUD dan DAK Tahun 2022 sebesar **Rp.108.421.347.276,00,-** dan realisasi anggarannya sebesar **Rp.99.119.565.745,00** atau **91,42%** dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja				
RSUD dr. Rubini Mempawah TA. 2022				
No	Uraian	Jumlah Pagu Anggaran 2022 (Rupiah)	Jumlah Realisasi Anggaran 2022 (Rupiah)	%
<b>1</b>	<b>2</b>			
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>108.421.347.276,00</b>	<b>99.119.565.745,00</b>	<b>91,42</b>
<b>1.</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>96.813.767.376,00</b>	<b>87.619.050.149,00</b>	<b>90,50</b>
	- Belanja Pegawai	50.792.570.997,00	46.725.053.292,00	91,99
	- Belanja Barang dan Jasa	46.021.196.379,00	40.893.996.857,00	88,86
<b>2.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>11.607.579.900,00</b>	<b>11.500.515.596,00</b>	<b>99,08</b>
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.607.579.900,00	11.500.515.596,00	99,08
	- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-
		<b>108.421.347.276,00</b>	<b>99.119.565.745,00</b>	<b>91,42</b>

## BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Anggaran Belanja RSUD Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

### ANGGARAN BELANJA SEBELUM DAN SETELAH PERUBAHAN RSUD DR. RUBINI MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2022

KODE							URAIAN	TARGET		Sisa Anggaran	
								Sebelum Perubahan APBD	Setelah Perubahan APBD		
PROGRAM											
KEGIATAN											
1							6	6	16		
							Rp.	Rp.			
1	02						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	76.064.186.287	108.421.347.276	(32.357.160.989)	
1	02	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	32.790.626.987	32.208.570.997	582.055.990	
1	02	01	2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.790.626.987	32.208.570.997	582.055.990	
1	02	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.784.191.031	22.588.022.544	196.168.487	
1	02	01	2.02	01	5.1.01	01.01	0001	Belanja Gaji Pokok PNS	16.803.827.464	16.779.346.766	24.480.698
1	02	01	2.02	01	5.1.01	01.02	0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.542.065.645	1.383.876.690	158.188.955
1	02	01	2.02	01	5.1.01	01.03	0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	140.560.000	130.840.000	9.720.000
1	02	01	2.02	01	5.1.01	01.04	0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.456.525.000	1.773.628.250	(317.103.250)
1	02	01	2.02	01	5.1.01	01.05	0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	449.705.750	319.012.750	130.693.000
1	02	01	2.02	01	5.1.01	01.06	0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.137.102.630	992.269.872	144.832.758
1	02	01	2.02	01	5.1.01	01.07	0001	Belanja Tunjangan PPh dan Tunjangan Khusus PNS	11.611.059	11.121.245	489.814
1	02	01	2.02	01	5.1.01	01.08	0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	294.868	246.575	48.293
1	02	01	2.02	01	5.1.01	01.09	0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	994.553.847	1.001.833.223	(7.279.376)
1	02	01	2.02	01	5.1.01	01.10	0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	35.802.590	39.749.124	(3.946.534)
1	02	01	2.02	01	5.1.01	01.11	0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	107.407.759	119.247.535	(11.839.776)
1	02	01	2.02	01	5.1.01	01.12	0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	104.734.419	36.850.514	67.883.905
1	02	01	2.02	01	5.1.01	02.01		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.234.835.956	7.088.948.453	145.887.503
1	02	01	2.02	01	5.1.01	02.01	0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	4.265.301.565	4.598.524.940	(333.223.375)
1	02	01	2.02	01	5.1.01	02.01	0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	-	78.000.000	(78.000.000)
1	02	01	2.02	01	5.1.01	02.03	0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	753.375.420	778.051.304	(24.675.884)
1	02	01	2.02	01	5.1.01	02.04	0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	950.389.045	1.063.772.087	(113.383.042)
1	02	01	2.02	01	5.1.01	02.05	0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.265.769.926	570.600.122	695.169.804
1	02	01	2.02	01	5.1.01	03.06		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.771.600.000	2.531.600.000	240.000.000
1	02	01	2.02	01	5.1.01	03.06	0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	2.771.600.000	2.531.600.000	240.000.000
							<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>43.273.559.300</b>	<b>76.212.776.279</b>	<b>- 32.939.216.979</b>	
1	02	01	2.01				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.999.175	29.999.175	-	
1	02	01	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.900	4.999.900	-	
1	02	01	2.01	01	5.1.02	01.01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	4.999.900	4.999.900	-
1	02	01	2.01	02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.767.725	2.767.725	-	
1	02	01	2.01	02	5.1.02	01.01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2.767.725	2.767.725	-
1	02	01	2.01	03			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.232.025	2.232.025	-	
1	02	01	2.01	03	5.1.02	01.01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2.232.025	2.232.025	-
1	02	01	2.01	04			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.767.575	2.767.575	-	
1	02	01	2.01	04	5.1.02	01.01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2.767.575	2.767.575	-



1	02	01	2.01	05				<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</b>	<b>2.232.175</b>	<b>2.232.175</b>	-
1	02	01	2.01	05	5.1.02	01.01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2.232.175	2.232.175	-
1	02	01	2.01	06				<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>14.999.775</b>	<b>14.999.775</b>	-
1	02	01	2.01	06	5.1.02	01.01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	7.529.775	7.529.775	-
1	02	01	2.01	06	5.1.02	01.01	0071	Belanja Lembur	7.470.000	7.470.000	-
1	02	01	2.02					<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>37.499.450</b>	<b>37.499.450</b>	-
1	02	01	2.02	03				<b>Pelaksanaan Penatausahaan dan Penggajian / Verifikasi Keuangan SKPD</b>	<b>14.999.850</b>	<b>14.999.850</b>	-
1	02	01	2.02	03	5.1.02	01.01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2.519.850	2.519.850	-
1	02	01	2.02	03	5.1.02	01.01	0071	Belanja Lembur	12.480.000	12.480.000	-
1	02	01	2.02	05				<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	<b>17.499.825</b>	<b>17.499.825</b>	-
1	02	01	2.02	05	5.1.02	01.01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	10.899.825	10.899.825	-
1	02	01	2.02	05	5.1.02	01.01	0071	Belanja Lembur	6.600.000	6.600.000	-
1	02	01	2.02	07				<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD</b>	<b>4.999.775</b>	<b>4.999.775</b>	-
1	02	01	2.02	07	5.1.02	01.01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2.719.775	2.719.775	-
1	02	01	2.02	07	5.1.02	01.01	0071	Belanja Lembur	2.280.000	2.280.000	-
1	02	01	2.05					<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>25.000.000</b>	<b>247.292.600</b>	- <b>222.292.600</b>
1	02	01	2.05	05				<b>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</b>	-	<b>187.292.600</b>	- <b>187.292.600</b>
1	02	01	2.05	05	5.1.02	02.12	0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	-	9.350.000	(9.350.000)
1	02	01	2.05	05	5.1.02	02.12	0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	177.942.600	(177.942.600)
1	02	01	2.05	10				<b>Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan</b>	<b>25.000.000</b>	<b>60.000.000</b>	- <b>35.000.000</b>
1	02	01	2.05	10	5.1.02	02.12	0002	Belanja Sosialisasi	25.000.000	60.000.000	(35.000.000)
1	02	01	2.06					<b>Administrasi Pelayanan Administrasi Umum</b>	<b>256.300.750</b>	<b>256.300.750</b>	-
1	02	01	2.06	01				<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>54.999.000</b>	<b>54.999.000</b>	-
1	02	01	2.06	01	5.1.02	01.01	0031	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	54.999.000	54.999.000	-
1	02	01	2.06	02				<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>24.747.600</b>	<b>24.747.600</b>	-
1	02	01	2.06	02	5.1.02	01.01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	21.147.600	21.147.600	-
1	02	01	2.06	02	5.1.02	01.01	0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	3.600.000	3.600.000	-
1	02	01	2.06	03				<b>Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan</b>	<b>99.541.500</b>	<b>99.541.500</b>	-
1	02	01	2.06	03	5.1.02	01.01	0036	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	99.541.500	99.541.500	-
1	02	01	2.06	05				<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>17.036.950</b>	<b>17.036.950</b>	-
1	02	01	2.06	05	5.1.02	01.01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	17.036.950	17.036.950	-
1	02	01	2.06	07				<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	-
1	02	01	2.06	07	5.1.02	04.01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.000.000	35.000.000	-
1	02	01	2.06	10				<b>Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah</b>	<b>24.975.700</b>	<b>24.975.700</b>	-
1	02	01	2.06	10	5.1.02	01.01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	14.177.400	14.177.400	-
1	02	01	2.06	10	5.1.02	01.01	0036	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.198.300	2.198.300	-
1	02	01	2.06	10	5.1.02	01.01	0071	Belanja Lembur	8.600.000	8.600.000	-



1	02	01	2.07						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.000.000	60.000.000	-
1	02	01	2.07	10					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.000.000	60.000.000	-
1	02	01	2.06	10	5.1.02	02.05	0050		Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	60.000.000	60.000.000	-
1	02	01	2.08						<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.048.000.000</b>	<b>1.429.169.904</b>	<b>- 381.169.904</b>
1	02	01	2.08	02					<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.380.000.000</b>	<b>- 380.000.000</b>
1	02	01	2.08	02	5.1.02	02.01	0059		Belanja Tagihan Telepon	45.000.000	45.000.000	-
1	02	01	2.08	02	5.1.02	02.01	0060		Belanja Tagihan Air	155.000.000	235.000.000	(80.000.000)
1	02	01	2.08	02	5.1.02	02.01	0061		Belanja Tagihan Listrik	800.000.000	1.100.000.000	(300.000.000)
1	02	01	2.08	04					<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>48.000.000</b>	<b>49.169.904</b>	<b>- 1.169.904</b>
1	02	01	2.08	04	5.1.02	02.01	0024		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	7.056	(7.056)
1	02	01	2.08	04	5.1.02	02.01	0031		Belanja Jasa Tenaga Keamanan	48.000.000	48.000.000	-
1	02	01	2.08	04	5.1.02	02.02	0005		Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	1.162.848	(1.162.848)
1	02	01	2.09						<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>166.813.300</b>	<b>166.813.300</b>	<b>-</b>
1	02	01	2.09	01					<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	<b>22.293.300</b>	<b>22.293.300</b>	<b>-</b>
1	02	01	2.09	01	5.1.02	01.01	0004		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.204.350	4.204.350	-
1	02	01	2.09	01	5.1.02	01.01	0013		Belanja Suku Cadang- Suku Cadang Alat Angkutan	16.988.950	16.988.950	-
1	02	01	2.09	01	5.1.02	02.01	0035		Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1.100.000	1.100.000	-
1	02	01	2.09	02					<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	<b>44.520.000</b>	<b>44.520.000</b>	<b>-</b>
1	02	01	2.09	02	5.1.02	01.01	0004		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.218.000	2.218.000	-
1	02	01	2.09	02	5.1.02	01.01	0013		Belanja Suku Cadang- Suku Cadang Alat Angkutan	10.665.850	10.665.850	-
1	02	01	2.09	02	5.1.02	02.01	0035		Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1.650.000	1.650.000	-
1	02	01	2.09	02	5.1.02	02.01	0067		Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	29.986.150	29.986.150	-
1	02	01	2.09	11					<b>Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>-</b>
1	02	01	2.09	11	5.1.02	03.02	0022		Belanja Pemeliharaan Alat Besar - Alat Bantu - Electric Generating Set	30.050.000	30.050.000	-
1	02	01	2.09	11	5.1.02	03.02	0121		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin	64.660.000	64.660.000	-
1	02	01	2.09	11	5.1.02	03.02	0123		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.290.000	5.290.000	-
1	02	01	2.10						<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>28.000.000.000</b>	<b>59.782.836.787</b>	<b>- 31.782.836.787</b>
1	02	01	2.10	01					<b>Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD</b>	<b>28.000.000.000</b>	<b>59.782.836.787</b>	<b>- 31.782.836.787</b>
1	02	01	2.10	01	5.1.01	99.99	9999		Belanja Pegawai BLUD	11.760.000.000	18.584.000.000	(6.824.000.000)
1	02	01	2.10	01	5.1.01	99.99	9999		Belanja Barang dan Jasa BLUD	15.702.014.100	32.289.856.887	(16.587.842.787)
1	02	01	2.10	01	5.1.01	99.99	9999		Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	537.985.900	8.908.979.900	(8.370.994.000)



1	02	02						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	12.421.546.625	13.114.464.313	-	692.917.688
1	02	02	2.01					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	8.004.195.925	8.011.901.925	-	7.706.000
1	02	02	2.01	13				Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	110.201.325	110.201.325		-
1	02	01	2.01	13	5.1.02	01.01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	99.591.000	99.591.000		-
1	02	01	2.01	13	5.1.02	01.01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	910.325	910.325		-
1	02	01	2.01	13	5.1.02	01.01	0030	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	9.700.000	9.700.000		-
1	02	02	2.01	14				Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.700.000.000	2.698.600.000		1.400.000
1	02	02	2.01	14	5.2.02	07.01	0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	2.700.000.000	2.698.600.000		1.400.000
								Baby Incubator	264.000.000	264.000.000		-
								Bed Pediatrik	115.000.000	115.000.000		-
								Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.400.000	-		1.400.000
								CPAP	89.000.000	89.000.000		-
								Infant Warmer	128.700.000	128.700.000		-
								Infusion Pump	57.600.000	57.600.000		-
								Patient Monitor	469.800.000	469.800.000		-
								Suction Pump	26.500.000	26.500.000		-
								Syringe Pump	576.000.000	576.000.000		-
								Ventilator Invasif	972.000.000	972.000.000		-
1	02	02	2.01	16				Pengadaan Obat, Vaksin	5.000.000.000	5.009.106.000	-	9.106.000
1	02	02	2.01	16	5.1.02	01.01	0036	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.500.000.000	2.500.000.000		-
1	02	02	2.01	16	5.1.02	01.01	0037	Belanja Obat -Obatan - Obat	2.500.000.000	2.509.106.000		(9.106.000)
1	02	02	2.01	20				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	193.994.600	193.994.600		-
1	02	02	2.01	20	5.1.02	01.01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	634.600	634.600		-
1	02	02	2.01	20	5.1.02	02.01	0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	10.000.000	10.000.000		-
1	02	02	2.01	20	5.1.02	02.01	0050	Belanja Jasa Kalibrasi	115.000.000	115.000.000		-
1	02	02	2.01	20	5.1.02	03.02	0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan - Alat Kedokteran - Alat Kedokteran	50.000.000	50.000.000		-
1	02	02	2.01	20	5.1.02	04.01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.360.000	18.360.000		-
1	02	02	2.02					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	4.140.526.850	4.825.738.538	-	685.211.688
1	02	02	2.02	12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	36.084.300	36.084.300		-
1	02	02	2.02	12	5.1.02	01.01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	9.084.300	9.084.300		-
1	02	02	2.02	12	5.1.02	01.01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.000.000	18.000.000		-
1	02	02	2.02	12	5.1.02	02.01	0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	9.000.000	9.000.000		-
1	02	02	2.02	15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	30.000.000	30.000.000		-
1	02	02	2.02	15	5.1.02	01.01	0043	Belanja Natura dan Pakan - Natura	30.000.000	30.000.000		-
1	02	02	2.03	32				Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3.737.449.825	4.422.661.513	-	685.211.688
1	02	02	2.03	32	5.1.02	01.01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	5.214.825	5.264.449		(49.624)
1	02	02	2.03	32	5.1.02	01.01	0036	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	17.625.000	17.625.000		-
1	02	02	2.03	32	5.1.02	01.01	0056	Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	171.500.000	171.500.000		-
1	02	02	2.03	32	5.1.02	02.01	0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3.524.350.000	4.169.200.000		(644.850.000)
1	02	02	2.03	32	5.1.02	02.01	0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.500.000	7.500.000		-
1	02	02	2.03	32	5.1.02	02.02	0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	40.312.064		(40.312.064)
1	02	02	2.03	32	5.1.02	04.01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.260.000	11.260.000		-
1	02	02	2.02	34				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	299.992.850	299.992.850		-
1	02	02	2.03	34	5.1.02	01.01	0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	85.792.850	85.792.850		-
1	02	02	2.03	34	5.1.02	02.01	0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	214.200.000	214.200.000		-



1	02	02	2.02	35					Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	36.999.875	36.999.875	-
1	02	02	2.03	34	5.1.02	01.01	0024		Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	12.999.875	12.999.875	-
1	02	02	2.03	34	5.1.02	01.01	0052		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.000.000	24.000.000	-
1	02	02	2.03						Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	197.830.200	197.830.200	-
1	02	02	2.03	02					Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	197.830.200	197.830.200	-
1	02	02	2.03	02	5.1.02	01.01	0024		Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	188.690.200	188.690.200	-
1	02	02	2.03	02	5.1.02	01.01	0052		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.380.000	4.380.000	-
1	02	02	2.03	02	5.1.02	04.01	0024		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.760.000	4.760.000	-
1	02	02	2.04						Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	78.993.650	78.993.650	-
1	02	02	2.04	02					Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	78.993.650	78.993.650	-
1	02	02	2.04	02	5.1.02	01.01	0024		Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	5.803.650	5.803.650	-
1	02	02	2.04	02	5.1.02	01.01	0052		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.840.000	14.840.000	-
1	02	02	2.04	02	5.1.02	02.01	0003		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	30.000.000	30.000.000	-
1	02	02	2.04	02	5.1.02	02.01	0071		Belanja Lembur	9.310.000	9.310.000	-
1	02	02	2.04	02	5.1.02	04.01	0024		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.040.000	19.040.000	-
1	02	02	2.03						Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota	1.228.400.000	1.088.400.000	140.000.000
1	02	02	2.03	02					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.228.400.000	1.088.400.000	140.000.000
1	02	02	2.03	02	02.01	0014	0075		Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid 19	1.228.400.000	1.088.400.000	140.000.000
<b>JUMLAH</b>										<b>76.064.186.287</b>	<b>108.421.347.276</b>	<b>(32.357.160.989)</b>

Anggaran Belanja pada Perangkat Daerah RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun Anggaran 2022 Sebelum Perubahan berjumlah **Rp.76.064.186.287,00** dan Setelah Perubahan berjumlah **Rp.108.421.347.276,00**



## BAB III

### HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

#### 3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Capaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RSUD Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1  
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN  
RSUD DOKTER RUBINI MEMPAWAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2022

No.	Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :</b>	Persentase meningkatnya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Sudah terlaksana dengan baik	-	-	
	1	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya dokumen Perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja</b>	<b>Sudah terlaksana dengan baik</b>		
	-	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah	Sudah terlaksana dengan baik		
	-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	Sudah terlaksana dengan baik	-	-
	-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	Sudah terlaksana dengan baik	-	-
	-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	Sudah terlaksana dengan baik	-	-
	-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	Sudah terlaksana dengan baik	-	-
	-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja	Sudah terlaksana dengan baik	-	-
	2.	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya penyusunan laporan administrasi keuangan dan dokumen pelaporan</b>	<b>Sudah terlaksana dengan baik</b>	-	-
	-	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	Sudah terlaksana dengan baik	Pelaksanaan pengembangan SDM bagi tenaga kesehatan dalam penanganan Kasus Covid 19 sebagai besar dana anggarannya tidak dapat terserap dengan optimal hanya 71,72% bagi jasa pelayanan kesehatan ASN di rumah sakit dikarenakan makin berkurangnya kasus Covid 19 yang dirawat di rumah sakit	Untuk lebih meningkatkan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit dalam penanganan kasus Covid 19 bagi tenaga kesehatan pemerintah daerah harus tetap menganggarkan untuk belanja insentif tenaga kesehatan penanganan Covid 19 dalam bentuk apresiasi dalam menjaga kesehatan dan memutus rantai covid 19 di wilayah Kabupaten Mempawah.



	- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan pengelolaan asset/ barang	Sudah terlaksana dengan baik	-	-
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Sudah terlaksana dengan baik		
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semester	Sudah terlaksana dengan baik		
3.	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur dan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan</b>	<b>Sudah terlaksana dengan baik</b>		
	- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya seragam dinas	Sudah terlaksana dengan baik		
	- Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pelaksanaan sosialisasi	Sudah terlaksana dengan baik		
4.	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana dalam meningkatkan pelayanan administrasi umum</b>	<b>Sudah terlaksana dengan baik</b>		
	- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Sudah terlaksana dengan baik		
	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor dan jumlah materai	Sudah terlaksana dengan baik		
	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat/ Bahan kebersihan	Sudah terlaksana dengan baik		
	- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi penyediaan makana dan minuman rapat	Sudah terlaksana dengan baik		
	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi keikutsertaan pada rapat konsultasi dan koordinasi di luar daerah	Sudah terlaksana dengan baik		
	- Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bahan untuk penataan arsip	Sudah terlaksana dengan baik		
5.	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>				
	- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya rumah dinas dokter spesialis	Sudah terlaksana dengan baik		
6.	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpenuhinya pelayanan penunjang administrasi perkantoran di rumah sakit</b>	<b>Sudah terlaksana dengan baik</b>		



	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa belanja telpon, air dan listrik	Sudah terlaksana dengan baik	Untuk menunjang pemenuhan kebutuhan jasa penunjang perlu adanya penambahan anggaran untuk operasional rumah sakit	Untuk meningkatkan pelayanan penunjang administrasi adanya penambahan anggaran yang dialokasikan untuk biaya belanja jasa kantor biaya tagihan telepon dan listrik rumah sakit
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas keamanan kantor	Sudah terlaksana dengan baik		
7.	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpenuhinya pemeliharaan rutin dan berkala sarana dan prasarana fasilitas penunjang layanan di rumah sakit</b>	<b>Sudah terlaksana dengan baik</b>		
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara	Sudah terlaksana dengan baik		
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pajak dan izin kendaraan	Sudah terlaksana dengan baik		
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung	Sudah terlaksana dengan baik		
8.	<b>Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan BLUD dalam menunjang kegiatan operasional rumah sakit</b>	<b>Sudah terlaksana dengan baik</b>		
	- Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pelayanan kesehatan operasional BLUD	Sudah terlaksana dengan baik		
2	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :</b>	<b>Persentase peningkatan penyediaan layanan kesehatan</b>	<b>Sudah terlaksana dengan baik</b>	-	-
1.	<b>Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Terpenuhinya penunjang sarana dan prasarana pengadaan fasilitas kesehatan yang sesuai standar di rumah sakit</b>	<b>Sudah terlaksana dengan baik</b>		
	- Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit	Sudah terlaksana dengan baik	-	-
	- Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat-alat kesehatan rumah sakit yang sesuai standar	Sudah terlaksana dengan baik		
	- Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah kebutuhan obat-obatan dan bahan habis pakai	Sudah terlaksana dengan baik	-	-
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	Jumlah peralatan medis rumah sakit yang terpelihara	Sudah terlaksana dengan baik	-	-
2.	<b>Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Terpenuhinya peningkatan penyediaan layanan kesehatan di rumah sakit</b>	<b>Sudah terlaksana dengan baik</b>	-	-



	- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah kunjungan layanan masyarakat ke klinik VCT	Sudah terlaksana dengan baik		
	- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kasus gizi buruk yang ditangani di rumah sakit	Tidak dapat terlaksana		
	- Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah peningkatan mutu pelayanan dalam upaya kesehatan masyarakat	Sudah terlaksana dengan baik	Untuk Belanja Jasa Tenaga Kesehatan anggaran hanya bisa dapat dibayarkan sampai 9 bulan dengan adanya Perbup Bupati tentang SSH dan SBU yang baru.	Untuk meningkatkan penyediaan kesehatan masyarakat di rumah sakit perlu adanya Tenaga Harian Lepas dalam menunjang operasional pelayanan di rumah sakit sehingga perlu disesuaikan UMR untuk Belanja Jasa Tenaga Kesehatan yang dialokasikan penambahan anggaran pada perubahan anggaran untuk direalisasikan.
	- Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah layanan mobilitas ambulance pelayanan rujukan	Sudah terlaksana dengan baik		
	- Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	Jumlah elemen penilaian akreditasi rumah sakit	Sudah terlaksana dengan baik		
3.	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	<b>Terpenuhinya system informasi kesehatan dan data rekam medis di rumah sakit</b>	<b>Sudah terlaksana dengan baik</b>	-	-
	- Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah layanan data rekam medis	Sudah terlaksana dengan baik	-	-
4.	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Terpenuhinya pengembangan standarisasi manajemen pengelolaan keuangan BLUD Rumah Sakit</b>	<b>Sudah terlaksana dengan baik</b>		
	- Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Frekuensi standarisasi manajemen pengelolaan keuangan BLUD Rumah Sakit	Sudah terlaksana dengan baik	-	-
3	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	<b>Persentase pengemban SDM Kesehatan yang berkualitas</b>	<b>Sudah terlaksana dengan baik</b>		
1.	<b>Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota</b>	<b>Tersedianya belanja insentif tenaga kesehatan penanganan Covid 19</b>	<b>Sudah terlaksana dengan baik hanya 50,19%</b>		
	- Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase pengembangan SDm kesehatan yang berkualitas	Sudah terlaksana dengan baik	Pelaksanaan pengembangan SDM bagi tenaga kesehatan dalam penanganan Kasus Covid 19 sebagai besar dana anggarannya tidak dapat tersrap dengan optimal hanya sebesar 66,99% dikarenakan makin berkurangnya kasus Covid 19 yang dirawat di rumah sakit	Untuk lebih meningkatkan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit dalam penanganan kasus Covid 19 bagi tenaga kesehatan pemerintah daerah harus tetap menganggarkan untuk belanja insentif tenaga kesehatan penanganan Covid 19 dalam bentuk apresiasi dalam menjaga kesehatan dan memutus rantai covid 19 di wilayah Kabupaten Mempawah.

### 3.2. Kebijakan Strategis yang ditetapkan.

Terdapat Kebijakan Strategis RSUD Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah

Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**KEBIJAKAN STRATEGIS  
RSUD DOKTER RUBINI MEMPAWAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2022**

No.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
1.	Menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah	Peraturan Bupati Mempawah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah tanggal 29 September 2016 sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Tanggal 6 Pebruari 2008.	Menetapkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Dokter Rubini Mempawah untuk digunakan oleh perangkat daerah untuk melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional serta dapat dijasikan bahan akuntabilitas kinerja rumah sakit
2.	Menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pontianak Nomor 37 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pontianak Nomor 8 Tahun 2013 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012	Peraturan Bupati Mempawah Nomor 7 Tahun 2015 tanggal tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pontianak Nomor 37 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pontianak Nomor 8 Tahun 2013 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012	Menetapkan Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012

### 3.3. Tidak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tidak ada Rekomendasi DPRD untuk Program dan Kegiatan pada Perangkat Daerah RSUD Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA RSUD DOKTER RUBINI MEMPAWAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2021			
No	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN

## BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PENUGASAN

### 4.1. Urusan Pemerintah yang Ditugas-Pembantuan

Tidak Terdapat adanya Urusan Pemerintah yang Ditugas-Pembantuan pada RSUD Dokter Rubini Mempawah pada Tahun 2022.

### 4.2 Hambatan / Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Tidak ada Hambatan / Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian pada RSUD Dokter Rubini Mempawah pada Tahun 2021 karena tidak terdapat Urusan Pemerintah yang ditugas-Pembantuan.

## BAB V P E N U T U P

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan mengingat pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 telah berakhir, maka perlu segera dipersiapkan data/bahan/materi untuk **Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2022.**

Pada Tahun Anggaran 2021, RSUD Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah melaksanakan 3 (Tiga) Program yang meliputi 12 (Dua Belas) Kegiatan dan 38 (Tiga Puluh Delapan) Sub Kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut dan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan perkembangan pembangunan telah ditetapkan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan diatas, yang dituangkan Sub dalam APBD setelah perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp.108.421.347.276,00.**

Dengan adanya beberapa masalah terutama dengan adanya Pandemi Covid 19 pada Tahun 2022 anggaran yang terealisasi hanya sebesar **Rp. 99.119.565.745,00** atau **91,42%** . Demikian pula pelaksanaan capaian kinerjanya Di RSUD Dokter Rubini Mempawah, ada beberapa kegiatan yang capaian kinerjanya tidak mencapai target yang telah dibuat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Demikian **Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) RSUD Dokter Rubini Mempawah** ini disusun sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Diharapkan agar laporan ini dapat memberikan kontribusi positif didalam peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.